



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



“Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan”



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM
Direktur Jenderal PSDKP



Ambon, 10 September 2025



Johanis J Medea, S.St.Pi, M.Pi
Kepala Stasiun PSDKP Ambon

disampaikan pada:

Rapat Koordinasi pembahasan Analisis Penguatan Dimensi
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sesuai RPJMN 2025-
2029 di Maluku

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tusi dan Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Tugas PSDKP

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Fungsi PSDKP

- | | |
|---|--|
|  Pengawasan Tata Ruang Laut |  Operasi Kapal Pengawas Dan Pesawat patroli |
|  Pengawasan Penangkapan Ikan |  Pengelolaan Sarana dan prasarana Pengawasan |
|  Pengawasan Budi Daya |  Penegakan Hukum di Sektor Kelautan dan Perikanan |
|  Pengawasan UPI dan Distribusi Hasil Perikanan | |



Tugas & Kewenangan Pengawasan SDKP



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



- UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
- UU 6 thn 2023 tentang Penetapan PERPU no 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU
- UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014

Kekuatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Pesawat Patroli



34 unit kapal pengawas

	Kelas I	KP Orca 01 KP Orca 02 KP Orca 03	KP Orca 04 KP Orca 05 KP Orca 06	6
	Kelas II	KP Hiu Macan Tutul 01 KP Hiu Macan Tutul 02 KP Paus 001 KP Barakuda 01 KP Barakuda 02		5
	Kelas III	KP Hiu Macan 001 KP Hiu Macan 003 KP Hiu Macan 004 KP Hiu Macan 005 KP Hiu Macan 006 KP Hiu 11	KP Hiu 12 KP Hiu 13 KP Hiu 14 KP Hiu 15 KP Hiu 16 KP Hiu 17	12
	Kelas IV	KP Hiu 001 KP Hiu 002 KP Hiu 003 KP Hiu 004 KP Hiu 005	KP Hiu 006 KP Hiu 007 KP Hiu 008 KP Hiu 009 KP Hiu 010	10
	Kelas V	KP. Akar Bahar 001		1

PUSDAL dan RMC PSDKP



6 Pangkalan PSDKP



8 Stasiun PSDKP



91 unit speedboat dan URC



Personil PSDKP



910 orang
Pengawas
perikanan



204 orang
Pengawas
kelautan



568 orang
Awak kapal
pengawas



261 orang
Penyidik
perikanan

PROFIL STASIUN PSDKP AMBON



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

SATWAS SDKP
MOROTAI



SATWAS SDKP
HALSEL



SPEEDBOAT
PENGAWAS 8m
& 12m



Kantor Stasiun PSDKP Ambon



KAPAL PENGAWAS PERIKANAN HIU 13



SATWAS SDKP
TERNATE



NAPOLEON 055 (SPEEDBOAT
PENGAWAS) 12 METER

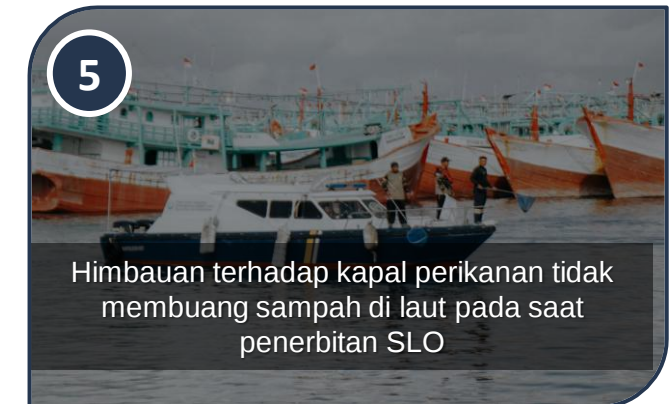
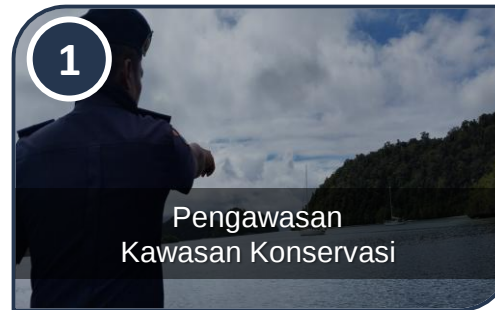
SATWAS SDKP
SBT



NAPOLEON 051 (SPEEDBOAT
PENGAWAS) 12 METER



“PSDKP harus mampu menjaga dan mengawasi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan”



Pemantauan dan Pengawasan *Illegal Fishing*



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Tujuan

Memastikan seluruh WPP NRI bebas dari kegiatan *illegal fishing* dan menjaga ekosistem laut (kawasan konservasi serta Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Dampak



Tingginya potensi kerugian negara dari pelanggaran bidang kelautan dan perikanan



Kurang optimalnya penerimaan PNBP sektor kelautan & perikanan



Terganggunya keamanan dan kenyamanan berusaha serta kelestarian SDKP



Degradasi ekosistem pesisir dan laut



Kegiatan



Illegal Fishing & kepatuhan kapal perikanan



Rumpon ilegal



Penyelundupan BBL



Pengelolaan sedimentasi laut



Pemanfaatan ruang laut



Alih Muat (Transshipment) di laut



Pelanggaran daerah penangkapan ikan

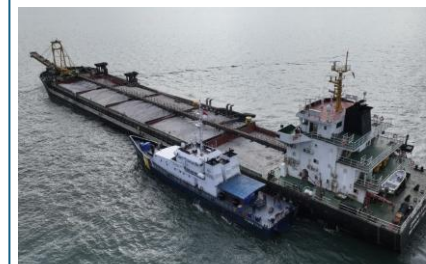
Dokumentasi



Operasi Pemberantasan
Illegal Fishing



Operasi Rumpon ilegal



Pengawasan hasil
sedimentasi laut



Operasi Bersama dan
patroli terkoordinasi



GPS

VMS

Radar/AIS/RDF

Ground Station /
Radar Satelit

Command
Center

POKMASWAS

Kapal Pengawas

Kapal Ikan
VMS/AIS

Kapal Ikan ilegal

UPT PSDKP

Kawasan
Konservasi

Sebaran 34 Kapal Pengawas



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Zona 5 5 unit

KP. Hiu 01, KP. Hiu 08
KP. Hiu 12, KP. Hiu 16

Zona 1 7 unit

KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Baracuda 01,
KP. Hiu Macan 01, KP. Hiu 17, KP. Hiu 03, KP.
Hiu 11

Zona 2 5 unit

KP. Orca 06, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP.
Hiu 15, KP. Paus 01

Zona 4 5 unit

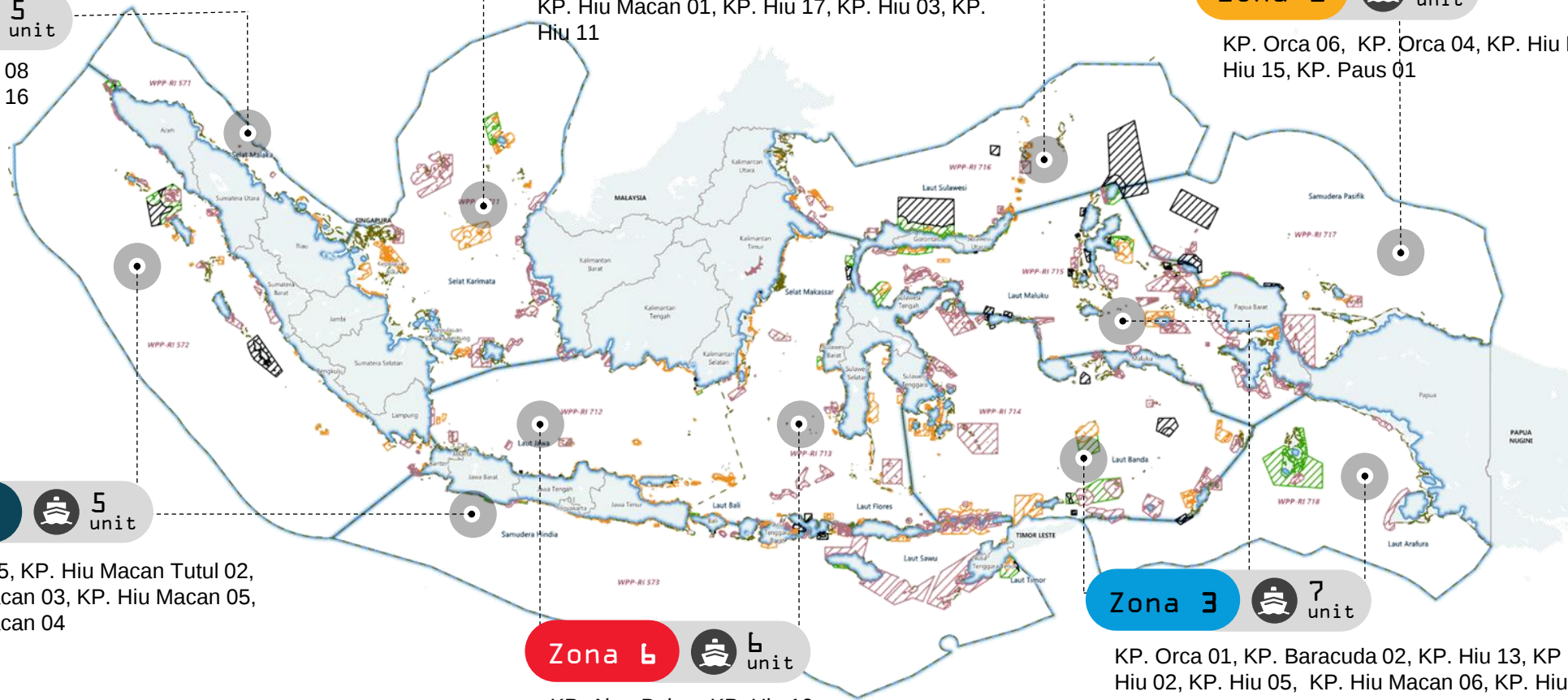
KP. Orca 05, KP. Hiu Macan Tutul 02,
KP. Hiu Macan 03, KP. Hiu Macan 05,
KP. Hiu Macan 04

Zona 6 6 unit

KP. Akar Bahar, KP. Hiu 10,
KP. Hiu 06, KP. Hiu 04, KP. Hiu 09, KP. Hiu 07

Zona 3 7 unit

KP. Orca 01, KP. Baracuda 02, KP. Hiu 13, KP.
Hiu 02, KP. Hiu 05, KP. Hiu Macan 06, KP. Hiu
14



Hasil Pengawasan *Illegal Fishing* Tahun 2025



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Kapal illegal fishing

137 kapal

119 Indonesia, 18 Asing



119
Kapal



8
Kapal



1
Kapal



4
Kapal



5
Kapal



Valuasi potensi Kerugian negara yang
dapat diselamatkan dari Kapal illegal fishing yang di tangkap

Rp. 1.92 Triliun

Rumpon illegal yang ditertibkan



95 Rumpon



Valuasi potensi Kerugian negara
yang dapat diselamatkan dari
Rumpon illegal yang di tertibkan

Rp. 77,6 Miliar



Valuasi potensi kerugian negara yang
Diselamatkan dari hasil operasi kapal pengawas

Rp. 1.99 Triliun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Tujuan

Memastikan tidak ada lagi pelanggaran di bidang kelautan serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan

Dampak



Rusaknya sumber daya kelautan akibat maraknya pelanggaran di bidang KP



Kurang optimalnya penerimaan PNBP sektor kelautan



Pemanfaatan, pengusahaan ruang laut pesisir, pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi tidak terkelola dengan baik



Kegiatan



Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan



Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut



Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Pengawasan Pencemaran Perairan



Intelijen Kelautan

Dokumentasi



Pengawasan Ruang Laut



Pengawasan Produksi Garam



Pengawasan Reklamasi



Pemeriksaan terumbu karang



Pengawasan di Kawasan Konservasi



Pengawasan pulau-pulau kecil

Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pemeriksaan **247**
Pelaku Usaha Kelautan



Pemanfaatan Ruang Laut
182 pelaku usaha



Pulau-pulau Kecil
37 pelaku usaha



Pengawasan Wisata Tirta
3 pelaku usaha



Pengawasan Reklamasi
4 pelaku usaha



Pengawasan ALSE
11 pelaku usaha



Kawasan Konservasi
8 pelaku usaha



Pengawasan Ekstraksi Garam
2 pelaku usaha

Pengawasan Pemanfaatan Pulau Kecil di Kepulauan Riau

Pelanggaran

- Memanfaatkan pulau kecil (Pulau Citlim, Pulau Kapal Besar, Pulau Kapal Kecil) tanpa izin (PKKPRL, rekomendasi dari MKP, izin reklamasi)
- Terindikasi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir laut

Tindakan lanjut

- Penghentian sementara kegiatan (disegel)
- Direkomendasikan agar izin usaha pertambangan dicabut
- Menghentikan seluruh kegiatan pertambangan
- Direkomendasikan tidak dikeluarkan izin pemanfaatan pulau kecil
- Akan dilaksanakan rapat koordinasi antar K/L terkait kegiatan tambang di pulau kecil wilayah Kepri



Pengawasan Sumber Daya Perikanan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Tujuan

Memastikan tidak ada lagi pelanggaran sektor perikanan serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dampak



Rusaknya sumber daya perikanan akibat maraknya pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan



Kurang optimalnya penerimaan PNBP sektor perikanan



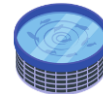
Menurunnya ketersediaan dan kualitas (mutu) pangan sektor perikanan



Kegiatan



Pengawasan Penangkapan Ikan (PNBP SDA)



Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan



Pengawasan Usaha Pengangkutan dan Pemasaran Ikan



Pengawasan usaha Pengolahan Ikan



Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan termasuk dalam Appendiks CITES



Pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan



Pengawasan peredaran Jenis Ikan Invasif dan penyelundupan BBL Intelijen Perikanan



Dokumentasi



Pengawasan Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan



Pengawasan Importasi Produk Perikanan



Pengawasan Tambak Udang



Pengawasan Pengolahan Perikanan di UPI

Pengawasan Kapal Perikanan dalam Mendukung PIT



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan



Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan



Penangkapan Ikan
15 pelaku usaha



Jenis Ikan Dilindungi
26 pelaku usaha



Perikanan Budi Daya
75 pelaku usaha



Usaha Pengolahan
89 pelaku usaha

Hasil Pengawasan Perdagangan Telur Penyu

- Perdagangan Telur Penyu Illegal ke Luar Negeri
- Nilai kerugian yang diselamatkan:
Rp.29.250.000
- Telur penyu tersebut masuk dalam Kategori CITES yang dilarang diperdagangkan



Sinergi Penggagalan Penyelundupan BBL

Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum telah menggagalkan penyelundupan **di 13 Lokasi**
(PMO 7/24, 2024)



Jumlah BBL yang diselamatkan
6,44 juta Ekor BBL



Nilai BBL yang diselamatkan
Rp. 849 miliar

Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Tujuan

Memastikan penyelesaian penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan secara efektif

Kegiatan



Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan



Penanganan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan



Sinergitas Aparat Penegak Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan



Peningkatan Kapasitas SDM Penegak Hukum/Supervisi Bidang Kelautan dan Perikanan

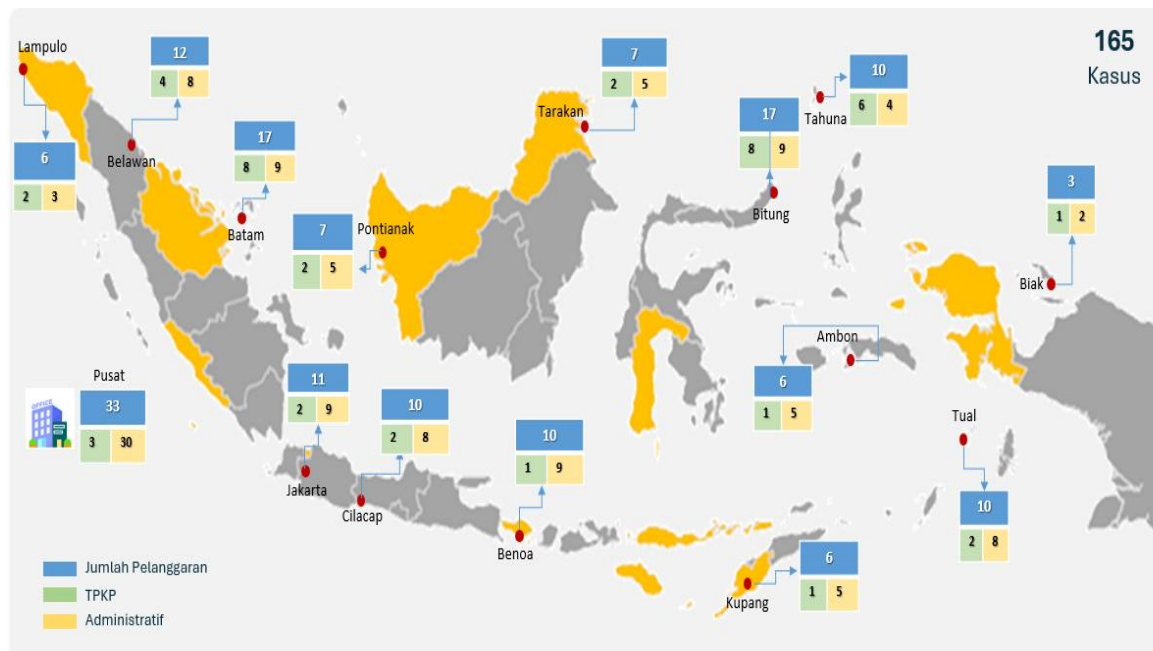


Pengelolaan dan Analisis Data Penanganan Pelanggaran serta Data Intelijen TPKP

Dampak

1. Tidak adanya kepastian hukum (Pidana/Sanksi Administratif)
2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
3. Terjadinya konflik sosial

SEBARAN KASUS PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



Jenis Pelanggaran KP



Illegal Fishing



Destructive Fishing



Alat Tangkap



Fishing Ground



SPKP



Ruang Laut



Reklamasi



Pemanfaatan PPPK



Pencemaran



Kerusakan ekosistem laut



Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan



Penanganan Sanksi Administratif

Sanksi Administratif	SDK	SDP	
		Hasil Operasi	Hasil TL SPKP
SP1	894	113	538
SP2	1	2	21
SP3	1	-	-
Paksaan Pemerintah	9	11	-
Denda	61	69	67
Jumlah	966	195	626
TOTAL	1.787		

* Data per 31 Agustus 2025

** SDK = Sumber Daya Kelautan

*** SDP = Sumber Daya Perikanan

Sinergi Pengawasan Berbasis Masyarakat (POKMASWAS)



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Pokmaswas berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan perikanan



INFORMASI



PEMANTAUAN



PELAPORAN



KERJASAMA



SAKSI



SOSIALISASI

Pokmaswas dan Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



“1.345 Kelompok Pokmaswas Aktif sampai dengan Tahun 2025”

Transformasi Pengawasan SDKP



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

2022 - 2024

2025 - 2029

2030 - 2034

2035 - 2039

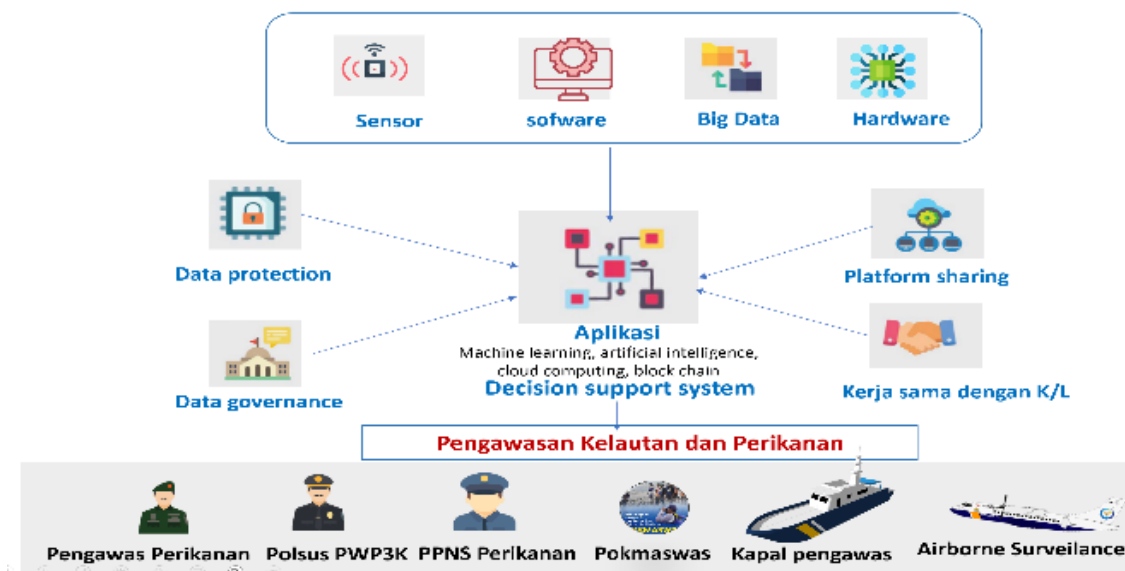
2040 - 2045

Integrated Surveillance System

1. Pengawasan dengan mengintegrasikan operasi kapal pengawas, pesawat patroli, command centre, psdal psdkp, RMC, data intelijen
2. Integrasi data perizinan kelautan dan perikanan dengan hasil pengawasan (Aplikasi SIP)
3. Penguatan pengawasan
 - a. Kapal Pengawas: 4 unit
 - b. SDM Pengawasan: 100 orang
 - c. Kelembagaan Pengawasan : 10 lokasi

Smart Surveillance System

1. Digitalisasi seluruh obyek pengawasan kelautan dan perikanan
2. Intelijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Sistem Pengawasan Maritim (Broadband, Nano Satelit, Sistem Pengawasan SDK dengan ROV)
4. Pengawasan berbasis Internet of Thing (IoT):
 - a. Electronic Document
 - b. Forensic Document
 - c. Big Data analytic
 - d. Machine Learning
5. Penguatan pengawasan
 - a. Kapal Pengawas: 10 unit
 - b. RMC: 14 unit
 - c. SDM Pengawasan: 700 orang



Penguatan Pengawasan



Kapal Pengawas



RMC



Drone



Satelite



SDM Pengawasan



Kelembagaan Pengawasan



Prasarana

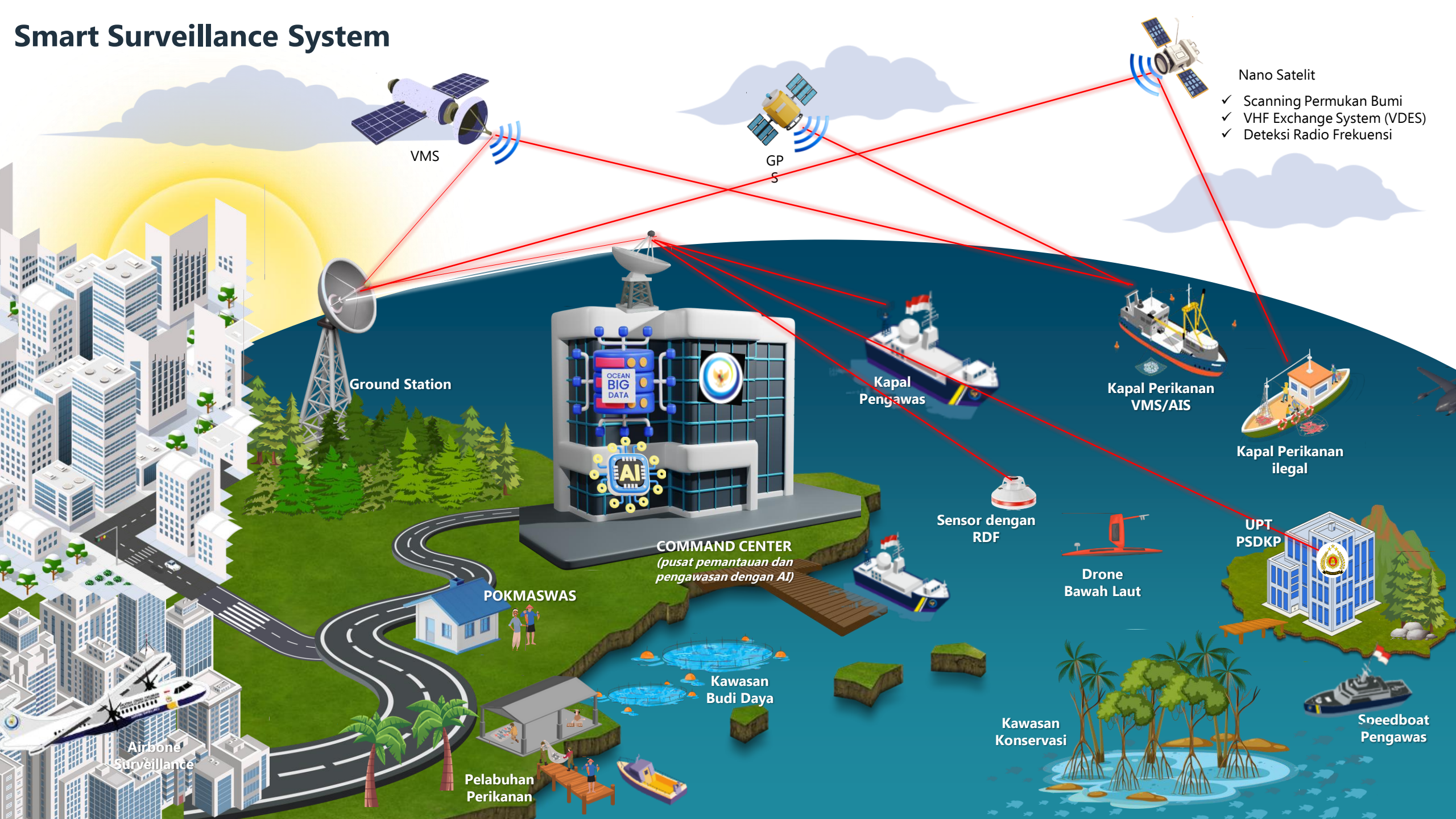


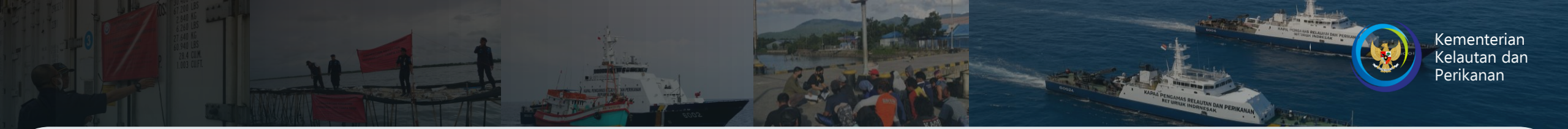
AI



Big Data

Smart Surveillance System





// “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pilar utama menjaga keberlanjutan. Dengan komitmen, sinergi, dan inovasi, laut Indonesia akan tetap sehat, produktif, dan lestari.”

//



Terima Kasih



©PSDKP2025

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat